



IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN PROGRAM REBO NYUNDA DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Ginulur Wahyu R¹

Magister Administrasi Publik UNTIRTA
7775230006@untirta.ac.id

Muhammad Rifqi Baihaqi²

Magister Administrasi Publik UNTIRTA
7775230011@untirta.ac.id

Nurhayadi³

Magister Administrasi Publik UNTIRTA
7775230010@untirta.ac.id

Tamimi⁴

Magister Administrasi Publik UNTIRTA
7775230005@untirta.ac.id

Juliannes Candith⁵

Magister Administrasi Publik UNTIRTA
juliannes.cadith@untirta.ac.id

Abstract

This research is motivated by the desire of researchers to know and analyze the optimization of Sundanese cultural characters through the Rebo Nyunda program that was realized by the Bandung city government. The Rebo Nyunda program is a Bandung city government program as part of the thematic days that apply in the city. This program is also one of the programs to preserve Sundanese culture because of the flow of modernization that cannot be avoided by all layers and technological advances that are faster than the progress of values and culture, and today the city is a very dynamic urbanization city. So with that the Bandung city government must be open to all residents of the region. The method in this research uses descriptive method with a qualitative approach. The results of the study were obtained through an interview process and document study. From the results of this study it was found that the program was less / not optimal.

Keywords: *government, local wisdom, character, Sustainable Cities and Communities, city of Bandung*



Pendahuluan

Kebudayaan Sunda merupakan salah satu kebudayaan tertua di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Dienaputra (2003, hlm. 4), bahwa "Kebudayaan sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua. Bahkan dibandingkan dengan kebudayaan Jawa sekalipun, kebudayaan Sunda sebenarnya termasuk kebudayaan-kebudayaan yang relatif lebih tua, setidaknya dalam hal proses pengenalan terhadap budaya tulisan."

Oleh sebab kebudayaan Sunda sebagai salah satu kebudayaan tertua, maka diperlukan pelestarian terhadap kebudayaan tersebut agar tetap eksis khususnya di kalangan masyarakat Sunda sendiri. Salah satu caranya yaitu dengan program-program Pemerintah di Jawa Barat, terkhususnya di Bandung kini telah hadir Program Rebo Nyunda (Putra dan Drajat, 2015, hlm. 365). Program Rebo Nyunda merupakan program mingguan dari pemerintah yang di gagas karena kekhawatiran akan lunturnya Budaya Sunda di Jawa Barat. Program tersebut sebagai salahsatu usaha pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap hari Rabu warga Kota Bandung diharuskan berkomunikasi dalam Bahasa Sunda dan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan Bahasa, sastra dan Aksara Sunda. Namun selain bahasa, masyarakat Bandung, khususnya bagi para pelajar di himbau juga untuk menggunakan pakaian adat sunda, yakni kebaya dan kain batik sebagai bawahan bagi perempuan serta iket kepala dan pangsi bagi laki-laki. Berdasarkan pesan yang ingin disampaikan Ridwan Kamil melalui program Rebo Nyunda kaitannya dengan internalisasi nilai kebudayaan Sunda siswa melalui program Rebo Nyunda dalam konteks pendidikan, internalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan nilai (kognitif, afektif, dan psikomotor) berada di dalam diri manusia (Setiawan dalam Yuliantini, 2015, hlm. 16).

Faktor pendorong dan faktor penghambat nilai kebudayaan sunda dalam program Rebo Nyunda dalam hal berpakaian adat sunda dan berbahasa sunda tidak terlepas dari pengaruh sosialisasi yang diberikan oleh keluarga, maupun rekan kerja. Penanaman nilai melalui sosialisasi tersebut selaras juga dengan pernyataan Kimbal Young (Idi, 2014, hlm 99) tentang sosialisasi, yakni "hubungan interaktif dimana seseorang dapat mempelajari kebutuhan sosial dan kultural yang menjadikan sebagai anggota masyarakat. Hal ini tampak bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar kepada seseorang agar dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, agar nanti dapat hidup di masyarakat dengan layak. Karena itu, sosialisasi merupakan proses belajar bagi seseorang." Proses sosialisasi dalam keluarga dan kantor menjadikan setiap individu termotivasi untuk berkeinginan mengembangkan kebudayaan Sunda.

Faktor penghambat implementasi nilai kebudayaan sunda ASN di Pemerintah Kota Bandung melalui program Rebo Nyunda, beberapa diantaranya yaitu masih kurangnya motivasi ASN untuk melakukan penghayatan akan nilai-nilai kebudayaan Sunda pada ASN dan kurangnya sosialisasi dari keluarga. Selain itu, hal tersebut dilatarbelakangi oleh diri individu masing-masing yang masih memiliki berbagai alasan pribadi, seperti belum terbiasa memakai baju adat sunda ataupun alasan lainnya yang dirasa masuk akal sehingga kini sebagian besar ASN di Pemerintah Kota



Bandung tidak memakainya kembali secara rutin pada hari Rabu.

Hal yang telah dipaparkan tersebut melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian berkenaan dengan Program Rebo Nyunda dalam usaha pengoptimalan karakter budaya Sunda di Pemerintah Kota Bandung. Dari kondisi yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi Program Rebo Nyunda dalam Mengoptimalkan Karakter Budaya Sunda di Pemerintah Kota Bandung”**.

Kajian Teori

Teori Pendekatan Rasional *Top-Down* dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya implementasi yang diperlukan dan memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, baru lah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan (*Content of Policy*) tersebut mencakup hal-hal berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh adanya kebijakan/ program.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat/ jangkauan perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan atau pengambil keputusan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumberdaya yang disediakan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

- a Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Selain itu, menurut Grindle (1980:10) untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ika

Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yg terpilih diperlukan



organisasi pelaksana karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan public.

Adapun lingkungan kebijakan bergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif, akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kemudian, menurut George Charles Edwards III, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain. Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, "Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?" dan "Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?" dan menemukan empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya. meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi atau sikap pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-



organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Selain itu, menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn menggunakan perspektif teoretis proses implementasi kebijakan menggunakan model yang dikembangkan oleh pendahulunya, Pressman dan Wildavsky menjadi sebuah model proses implementasi. Model yang mereka kembangkan bertumpu pada tiga pilar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori organisasi, khususnya tentang perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh karya Max Weber (Amitai Etzioni, 1974).
2. Studi tentang dampak kebijakan publik, terutama kebijakan yang bersifat hukum.
3. Studi tentang hubungan interorganisasi, termasuk hasil studi Pressman dan Wildavsky.

Mereka menyatakan pentingnya membedakan isi (*content*) kebijakan karena efektivitas implementasi akan sangat bervariasi bergantung pada tipe dan isu kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi juga akan sangat berbeda. Menurut mereka, tipe kebijakan akan memerlukan karakteristik proses, struktur, dan hubungan antarfaktor yang berbeda pula dalam implementasinya. Kemudian mereka mengklasifikasikan kebijakan berdasarkan dua karakteristik pokok, yaitu:

1. Besarnya perubahan yang dituju oleh kebijakan tersebut karena semakin besar perubahan yang diharapkan akan berdampak pula pada perubahan organisasional pelaksanaannya;
2. Besarnya penerimaan atas tujuan kebijakan dari para aktor implementasi.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
3. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik lembaga/ organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta berkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi).



6. Disposisi/ tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).
7. Namun, model dari Van Meter dan Van Horn memiliki keterbatasan, yakni hanya sesuai digunakan pada program yang bertujuan mendistribusikan barang dan pelayanan publik dan terlalu abstrak, dengan kategori dan variabelnya yang sulit untuk dioperasionalkan.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*Context of Implementation*). Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan Program Rebo Nyunda secara lebih mendalam.

Selain itu, dapat dijelaskan secara empiris bahwa program rebo nyunda merupakan produk hukum dan kegiatan dari kebijakan Perda No. 9 Tahun 2012. Perda tersebut merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dan pesan yang ingin disampaikan Walikota Bandung dalam upaya melestarikan kebudayaan Sunda dan ciri khas daerah sehingga mampu menumbuhkan karakter budaya Sunda dengan adanya peningkatan kualitas karakter mengenai kearifan lokal di lingkungan ASN Pemerintah Kota Bandung. ASN sebagai *role model* harus mampu memberikan citra yang baik kepada masyarakat ditengah perkembangan zaman sehingga nantinya tidak hilang dan tercampur dengan budaya lain yang lebih modern sehingga melupakan asal usul dan kearifan lokal setempat yang dimiliki. Selain itu, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ASN di Pemkot Bandung harus mampu memiliki kebanggaan terhadap kebudayaan daerah Bandung untuk bersaing dalam kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi banyak pihak (adanya integrasi antara budaya dan pendidikan).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, suatu metode yang bertujuan untuk untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang diperoleh dari perspektif pelaku yang diteliti (informan) tanpa adanya pengurangan atau penambahan seperti yang terjadi dalam optimalisasi implementasi kebijakan di Pemerintah Kota Bandung. Lokus penelitian ini adalah di wilayah Pemerintah Kota Bandung. Data yang dikumpulkan dari lokus penelitian berupa data primer dari hasil wawancara dan observasi.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini tim penyusun yang sudah melakukan observasi mengenai program Rebo Nyunda di kota Bandung akan menjelaskan sekaligus menganalisa dari apa yang telah kita dapatkan dari penelitian melalui data primer secara kualitatif.

Dalam penelitian ini tim penyusun memperoleh data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan sekaligus wawancara mendalam dengan para informan. Selain itu pengambilan data ini didukung oleh teknik *snowball* yang menjadikan hasil dari penelitian dijelaskan secara kualitatif. Penelitian ini juga merujuk pada teori Merilee S. Grindle yang konsentrasinya pada konten dan konteks pada suatu program serta



keberhasilan di tahap peng-implementasian, sehingga poin penting yang akan di bahas terkait program Rebo Nyunda ini mulai dari aspek pemerintah, kearifan lokal hingga kota dan komunitas yang berkelanjutan.

Dalam menjelaskan serta mengaalisa program ini tim penyusun membagi data yang telah di dapatkan melalui hasil observasi pada beberapa pembahasan yaitu :

1. Landasan program Rebo Nyunda di Kota Bandung
2. Proses pembentukan program Rebo Nyunda di Kota Bandung
3. Pembahasan secara kualitatif.

Landasan Program Rebo Nyunda di Kota Bandung

Program *Rebo Nyunda* merupakan program mingguan dari pemerintah yang di gagas karena kekhawatiran akan lunturnya Budaya Sunda di Jawa Barat. Program tersebut sebagai salah satu usaha pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap hari Rabu warga Kota Bandung diharuskan berkomunikasi dalam Bahasa Sunda dan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan Bahasa, sastra dan Aksara Sunda. Namun selain bahasa, masyarakat Bandung, khususnya bagi para pelajar di himbau juga untuk menggunakan pakaian adat sunda, yakni kebaya dan kain batik sebagai bawahan bagi perempuan, dan iket kepala serta apabila memungkinkan menggunakan pangsi bagi laki-laki.

Alasan lain yang melandasi terciptanya perda terkait program Rebo Nyunda antara lain yaitu budaya sunda yang harus terpatri dalam diri masyarakat sunda khususnya dan masyarakat luar sunda yang berdomisili di Kota Bandung dalam upaya mengharai budaya sunda sendiri. Untuk melaksanakan program tersebut tentu pemerintah memiliki kuasa untuk meng-intervesi berbagai pihak dan stakeholder, dalam hal ini surat edaran juga menjadi landasan hukum atau legitimasi bagi Pemkot Bandung pada Apartur Sipil Negara di Kota Bandung.

Proses Pembentukan Program Rebo Nyunda di Kota Bandung

Untuk mencetuskan suatu program idealnya tentu perlu ada sinkronisasi antara visi dan misi hingga renstra suatu kota ataupun pemimpin daerah, dalam hal ini proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Perda nomor 9 tahun 2012 mengenai Penggunaan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Aksara Sunda, selanjutnya proses pembuatan program ini didukung dengan surat edaran dari beberapa instansi yang mengharuskan para Aparatur Sipil Negara di kantornya untuk patuh pada esensi dari surat edaran tersebut.

Produk hukum berupa perda nomor 9 tahun 2012 dan juga surat edaran dari masing-masing kepala dinas di instansi adalah bentuk serius pemerintah dalam melindungi serta melestarikan budaya sunda sekaligus semua yang terkandung di dalamnya, selain itu sikap partisipatif juga perlu dikembangkan untuk terus memberikan variasi dari program Rebo Nyunda sendiri, dalam hal ini berbagai pihak dan *stakeholder* juga turut memberikan perkembangan atau proses ke arah yang lebih baik dengan terus memberikan inovasi baru sebagai konten dari program Rebo Nyunda tersebut mulai dari kegiatan 'Mojang jajaka' hingga kegiatan 'cianjuran' yang



diadakan secara rutin dalam kurun waktu yang berbeda, dengan seperti itu dapat digambarkan bahwa proses pembuatan program Rebo Nyunda ini terbilang sangat progresif dilihat dari aspek partisipatifnya *stakeholder* dan berbagai pihak untuk melestarikan budaya tersebut. Dan jika dilihat dari cakupan isi kebijakannya, program ini sudah masuk dalam karakteristik teori dari Grindle yaitu pemanfaatan sumberdaya yang ada, sumberdaya disini yaitu berupa kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat Kota Bandung adalah budaya Sunda, lebih dari itu didorongnya proses dalam menyusun program ini juga tak lepas dari semangat masyarakat Kota Bandung untuk bangga merevitalisasi budayanya yang kian hari semakin tertinggal oleh modernisasi yang menjadi budaya.

Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Adanya Kebijakan/ Program.

Kepentingan disini tentunya menjadi sebuah konteks yang sangat urgen dibalik hadirnya kebijakan berupa program rebo Nyunda. Produk hukum yang berorientasi pada terintegrasinya budaya dan Pendidikan menjadi sebuah acuan untuk membangun Kota Bandung sebagai juara diantara Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kompetisi yang bergerak kearah positif inilah yang melandaskan inovasi baru berupa perda nomor 9 tahun 2012 sebagai kebijakan yang menjalankan salah satu kepentingan daerah yang diwakilkan melalui Visi dan Misi kepala daerah. Budaya sunda sendiri pada dasarnya secara praktik di masyarakatnya sudah tertuang tanpa harus ada kebijakan, karena mulai dari Bahasa serta etika yang diakui di tengah masyarakat secara tidak langsung sudah berjalan sendirinya melalui kegiatan komunikasi dari berbagai lapisan, namun perlu kita sadari bahwa zaman akan terus bergerak membawa perubahannya, dengan alasan kuat itulah kebijakan ini terbit untuk menjadi benteng dari pesatnya Gerakan perubahan di tengah masyarakat khususnya di Kota Bandung.

Modernisasi yang telah secara umum diterima dewasa ini sudah memiliki daya dalam mengubah gaya hidup masyarakat dari adab hingga kebiasaan yang dilakukan, maka dari itu suatu kepentingan bagi pemerintah Kota Bandung untuk menerapkan kebijakan yang efektif sebagai garda terdepan yang bersifat tertulis agar identitas masyarakat tidak hilang tergerus oleh derasnya faktor eksternal berupa modernisasi. Konteks lain yang membahas tentang kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan adalah visi dan misi seperti yang secara umum yang sudah di jelaskan bahwasanya hadirnya kebijakan terkait Rebo nyunda dikarenakan untuk memenuhi kepentingan dan keperluan hak masyarakat serta daerah yang dituangkan dalam perencanaan jangka Panjang hingga pendeknya.

Secara judul pembahasan 'kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan/program' ini termasuk pada karakteristik teori Grindle yang juga mengukur tingkat ke efektifan suatu program kebijakan yang di lahirkan oleh pemerintah yang tak lain berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kebutuhan sosial yang dilanda dekadensi moral. Pada akhirnya program Rebo Nyunda yang di hadirkan untuk menepati impian daerah dan kepala daerah sekaligus ini menjadi karuia yang patut di syukuri bagi masyarakat Kota Bandung Khususnya karena ASN di Kota Bandung masih berupaya menjadi objek visual pertama yang menampilkan hal berharga dari apa yang dianggap sangat berpengaruh dalam membangun karakter dari komunitas terkecil hingga yang besar.



Jenis Manfaat Yang Akan Dihilangkan.

Kebijakan dibuat untuk perubahan kearah yang lebih baik dan ditujukan pada seluruh lapisan masyarakat yang berada dalam suatu daerah, dalam hal ini seluruh targetan yang akan dicapai butuh konsep yang terukur, karena tidak ada program yang baik tanpa perencanaan yang matang. Begitupun juga untuk menilai kebermanfaatan suatu program perlu ada ukuran dan standarisasi selain sebagai langkah profesional dalam membuat kebijakan, tentunya sebagai tolok ukur dan media pengawasan serta evaluasi dalam menjalankan kebijakan dan program. Dengan begitu implikasi yang didapat akan berupa hal yang positif meskipun akan dirasakan secara langsung atau berupa proses yang lama, hal yang sudah sangat dipastikan dari efektif atau tidaknya program Rebo Nyunda yaitu dari proses pelaksanaannya dilapangan, karena suatu kebijakan akan diuji melalui konsistensinya dilapangan berdasarkan faktor pendukung serta pihak yang turut berpartisipasi, dalam wawancara tim penyusun terkait efektifitas Rebo Nyunda, narasumber menyampaikan :

“sejauh ini kita (pemkot Bandung) masih terus membangun hubungan dengan berbagai pihak untuk terus melaksanakan program Rebo Nyunda biar kerasa manfaatnya dan gunanya ke masyarakat dengan cara seperti membangun relasi dengan Disbudpar dalam tatapelaksanaan beberapa program.”

Ucapan tersebut disampaikan oleh bagian staff unit tata pelaksanaan bagian Orpad (Organisasi Perangkat Daerah). Dalam sesi wawancara juga narasumber menjelaskan bahwa program Rebo Nyunda ini juga bukan hanya sekedar penggunaan Bahasa Sunda serta pakaian adat, namun berisikan kegiatan bulanan berupa ‘degung’ (panggung seni), hingga pada pemilihan ‘Mojang jajaka’. susunan konten dari program Rebo Nyunda ini tentu dituntut untuk mengandung nilai yang dapat diambil oleh masyarakat sehingga dikonversi menjadi manfaat. Dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada manfaat yang sangat jelas arah orientasinya yaitu:

Integrasi Nilai Pendidikan

Suatu kebanggaan yang harus disyukuri bahwa hadirnya produk hukum terkait Perda no. 9 tahun 2012 adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap semua organisme yang ada di Kota Bandung untuk merasakan inovasi baru yaitu Pendidikan yang dibalut dengan nilai kental kebudayaan Sunda, sehingga para pelajar muda dapat edukasi secara tidak langsung untuk menghargai budaya yang menjadi identitasnya serta menjadi aktor terdepan dalam derasnya arus asimilasi *western*.

Derajat/ Jangkauan Perubahan yang Diharapkan

Secara definisi perubahan adalah hadirnya pergeseran, peralihan ke arah positif/negatif, untuk memaknai segala kebijakan yang dibuat perlu ada kajian mendalam secara teoritis. Melihat kota dari segi karakteristik fungsinya, bahwa suatu kota yang dianggap dominan dan dapat dikatakan menonjol pada kota dalam hal ini adalah kota Bandung. Pemerintah sebagai manusia yang memiliki kekuasaan menjalankan kehendak negara yang diperintahkan oleh konstitusi baik dalam hubungan fungsional maupun dalam hubungan kerjasama antara pihak yang



pemerintah yang berkuasa/ pengaturan dengan rakyat sebagai pihak yang dikuasai/ diatur pada hakikatnya memiliki otoritas untuk membuat keputusan sekaligus dapat melakukan tindakan untuk kepentingan yang diinginkan baik secara bersama-sama maupun secara sepihak dalam pengertian dari pihak tertentu kepada pihak lainnya.

Karena manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi maka manusia hendaknya mempertahankan hal tersebut. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tersebut, maka prinsip kemanusiaan yang berbicara. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur itu. Semua manusia adalah luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, dan status sosial ekonomi. Kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Perubahan yang diharapkan mengenai perwujudan kebudayaan adalah ide, gagasan nilai norma yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, Kebudayaan adalah ekspresi eksistensi manusia di dunia. Dengan kebudayaannya, diharapkan manusia mampu menampakkan jejak- jejaknya dalam panggung sejarah dunia. Dalam hal ini, masyarakat kota Bandung juga diharapkan mampu menghargai kebudayaan dan menjadi manusia yang berbudaya.

Kedudukan pembuat kebijakan atau pengambil keputusan

Para pemegang otoritas yang menjadi pelaku kebijakan yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan program rebo nyunda hanya ada dua kelompok besar pelaku yang terlibat yaitu pimpinan terkait dalam hal ini yaitu walikota dan semua dinas terkait yang ada di Pemerintah Kota Bandung. Sebagai tindakan dan upaya dalam melestarikan kearifan lokal dan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan mempertahankan budaya dan bahasa yang dimiliki, penetapan kebijakan menempatkan legislatif adalah sebagai lembaga pembuat kebijakan publik dalam merealisasikan kebutuhan dan arahan atas kepentingan dari pimpinan terkait yakni walikota dalam rangka kebermanfaatannya bagi seluruh elemen masyarakat termasuk ASN di Pemerintah Kota Bandung. Walikota memiliki kebijakan yang bersifat strategis sebagai pelaksana pemerintahan berkenaan dengan implementasi dan realisasi program rebo nyunda baik itu secara taktis maupun itu secara teknis.

Dalam penelitian ini, fenomenologi yang terjadi dalam memaknai hari tematik Rebo Nyunda yang terbentuk di lingkungan ASN Pemkot Bandung berdasarkan pengalaman sadar mereka yang menjadikan hal ini sebagai aspek pendukung realisasi program. Fenomenologi tepat digunakan untuk memperoleh deskripsi dari suatu fenomena yang dialami secara sadar oleh individu, sehingga fenomena tersebut tampil sebagai dirinya sendiri. Fenomenologi berfokus pada keunikan pengalaman hidup dan esensi dari suatu fenomena tertentu dalam hal ini kesadaran akan implementasi fenomena Rebo Nyunda.

Secara sadar ASN di Pemkot Bandung memiliki nilai budaya dan norma yang sama untuk menjadikan program ini sebagai identitas untuk membedakan mereka dengan kelompok lain di sekeliling mereka. Letak program ini dirasakan tepat direalisasikan berkaitan dengan kedudukan pembuat kebijakan yang memiliki keterkaitan akan kepentingan bersama didalamnya.



Sumberdaya yang Disediakan

Sumber daya adalah suatu nilai, potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (renewable resources) dan sumber daya tak terbarukan (non-renewable resources).

Dalam hal ini sumber daya yang disediakan pemerintah kota Bandung dalam usaha untuk menegakan program rebo nyunda terbagi dalam tenaga ahli dan sarana. Tenaga ahli yang dimaksudkan adalah budayawan yang memang paham dan mengerti tentang budaya sunda. Sedangkan sarana ialah tersedianya pakaian yang diperuntukan untuk para aparatur sipil negara kota Bandung. Namun peneliti menunjukkan bahwa tidak semua sarana difasilitasi, nyatanya ada beberapa satuan perangkat kerja daerah yang tidak menyediakan sarana pakaian tersebut. Menurut Bapak Sofyan, Ketua bagian tata laksana Organisasi Perangkat Aparatur Daerah Kota Bandung dari pihak pimpinan sendiri belum ada akomodasi untuk masalah pakaian di kalangan aparatur sipil negara kota Bandung, sehingga masih dalam kewenangan biaya pribadi. Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Menurut Harold D. Laswell Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah pihak pertama, perumusan yang paling umum dikenal yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi pelaku seorang pelaku lain dalam hal ini kekuasaan selalu berlangsung minimal antara dua pihak jadi di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan. Jika bicara kekuasaan selalu identik dengan politik yang dimana dapat kita lihat politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral, namun satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik, kekuasaan merupakan suatu hal yang selalu berhubungan antar manusia, dalam pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, atau pun pemerintah sasaran kekuasaan dapat berupa individu atau pun kelompok. Dalam kehidupan kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik itu dalam masyarakat yang multikultur atau pun majemuk walau pun kekuasaan selalu ada namun kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota masyarakat, justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna pokok dari bentuk kekuasaan yaitu adanya orang atau individu yang dapat mempengaruhi pihak lain karena adanya suatu hal yang dikuasai. Kekuasaan yang dimaksud lebih kepada kekuasaan eksekutif yakni pelaksana kebijakan. Kekuasaan eksekutif dipegang saat itu oleh wali kota Bandung.

Kepentingan adalah suatu tindakan individu atau kelompok yang mendorong manusia kepada beberapa tingkatan yang mendasar. Kepentingan bersifat tetap berlandaskan hukum dan moral tertentu dalam memilih dan memutuskan yang berpengaruh terhadap suatu objek tertentu berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling di utamakan oleh individu atau kelompok. Bila Kekuasaan eksekutif ingin membuat kebijakan, haruslah menekan kepada kepentingan masyarakat dalam hal ini kesejahteraan masyarakat. Program Rebo nyunda diharapkan mampu mewakili



jati diri daerah kota Bandung

Karakteristik lembaga dan penguasa

Menurut Kartodiharjo pengertian lembaga adalah instrument yang mengatur hubungan antar individu. Lembaga juga berarti seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat yang telah mendefinisikan bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak istimewa yang telah diberikan serta tanggungjawab yang harus dilakukan. Silih Asah, Asih, Asuh yang menjadi motto dari berbagai lembaga khususnya penguasa dan pemerintah kota Bandung.

Kepatuhan dan daya tanggap

Parasuraman et al., (dalam Zeithaml dan Bitner (1996: 118) Responsiveness (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan. Kepatuhan dan daya tanggap para Aparatur Sipil Negara sangat dibutuhkan demi pengoptimalan program Rebo Nyunda ini.

(Siapa) pelaksana program

Aktor yang melaksanakan program Rebo Nyunda diimplementasi oleh seluruh perangkat daerah (internal) yang ada di pemerintah Kota Bandung, diantaranya:

1. Eksekutif : Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki jabatan politis.
2. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (ORPAD) Kota Bandung bagian ketatalaksanaan.

Di dalam kerangka substansi kebijakan pemerintah, otoritas untuk mengatur dan jika perlu melakukan pemaksaan berada di tangan pemerintah baik atas dasar kehendak secara sepihak maupun atas kehendak kesepakatan yang terbentuk. Ketika pembicaraan substansi kebijakan pemerintah telah berada pada persoalan kepentingan/ kebutuhan atau dapat dikatakan ketika arahan keputusan dan tindakan pemerintah untuk kelompok sasaran atau yang disebut antara *Target group*, maka realitas perlakuan substansi kebijakan pemerintah akan diwarnai oleh sistem pemerintahan yang berlangsung sesuai konstitusi yang diperlakukan.

Kebijakan pemerintah pada sistem pemerintahan yang otoritarian, tidak memberikan ruang kepada rakyat (publik) untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan apalagi dalam tindakan yang dilakukan. Semua tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi negara, ditetapkan secara sepihak pencapaiannya sekaligus tindakan pelaksanaan untuk mencapainya. Jika pencapaian tujuan dilakukan melalui program Rebo Nyunda yang ditetapkan melalui kebijakan yang diambil diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat Kota Bandung, secara supra maupun infra.



Kesimpulan

Program Rebo Nyunda adalah sebuah program dari Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari hari-hari tematik yang berlaku di Kota Bandung. Program ini digagas oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Program ini muncul karena adanya kekhawatiran akan lunturnya kebudayaan Sunda di Jawa Barat, khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian, program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa. Dalam program ini, setiap hari Rabu ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung dihimbau menggunakan pakaian adat Sunda yakni kebaya dan kain batik sebagai bawahan bagi perempuan, serta iket kepala batik dan menggunakan pangsi bagi laki-laki. Bersamaan dengan pakaian Sunda, diharapkan ASN mampu menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Upaya program Rebo Nyunda ini mampu menjadikan ASN sebagai *role model* bagi masyarakat untuk lebih mencintai dan mempertahankan kebudayaan Sunda secara utuh. Berkaitan, dengan implementasi, ASN mampu melaksanakannya dengan baik dengan tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang berasal dari kesadaran diri yang tinggi, sehingga upaya disipliner tidak begitu sering diterapkan. Namun, dalam pelaksanaannya surat edaran yang dikeluarkan oleh bagian ketatalaksanaan ORPAD Pemerintah Kota Bandung mampu menunjukkan capaian yang baik dan program yang terlaksana. Hal tersebut diikuti dengan adanya perbaikan karakter yang tetap mengedepankan kearifan lokal di lingkungan Pemerintah Kota Bandung meskipun memasuki zaman modern seperti saat ini yang penggunaannya bisa dikatakan kurang dinamis.

Kemudian, kebijakan ini kedepannya harus bisa diperluas regionalnya ke tingkat yang lebih tinggi yakni dari lingkup kota Bandung ke provinsi Jawa Barat dalam upaya pelestarian kearifan lokal yang berkelanjutan baik di kota maupun komunitas. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dikawal, tidak hanya Perda yang bekerja, namun didukung dengan kebijakan peraturan atau produk hukum yang lain. Salah satunya, kebijakan ini juga harus dilakukan dengan surat edaran yang berkelanjutan. Adanya rincian yang lebih jelas dan spesifik dalam setiap poin-poin kebijakan yang bukan hanya satu pasal saja dan mengatur satu kepentingan saja. Sehingga, diharapkan adanya pengawalan dari tim khusus yang akan bekerja untuk mengawasi dan memperingatkan agar serangkaian kegiatan program rebo nyunda yang sempat berhenti ataupun mangkrak di tengah jalan mampu terus berjalan di tengah modernisasi.

Referensi

- Herdiansyah, Haris. 2013. Wawancara, Observasi dan Focus Groups. Jakarta: Rajawali Pers
- Herimanto. 2011. Ilmu Sosial & Budaya Dasar. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Mulyadi, Deddy. 2010. Membidik Jalan menuju Publik Trust. Bandung: STIALAN Bandung Press.
- Syamsu, Andi. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama